

Kekaisaran Utsmani hingga Era Erdoğan: Jejak Perubahan Identitas Islam dalam Sejarah Turki
The Ottoman Empire to the Erdoğan Era: Traces of Change in Islamic Identity in Turkish History

Andi Wawan Mulyawan

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia
Email: wantax9@gmail.com

Abd. Rahim Yunus

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia
Email: rahimyunus397@gmail.com

Susmihara

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia
Email: susmiharad@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 10 June 2025
Revised : 29 June 2025
Accepted : 30 June 2025
Published : 5 July 2025

Keywords: Ottoman Empire, Republic of Türkiye, secularism, Atatürk, Islam, modernization, religious identity

Kata kunci: Kekaisaran Utsmani, Republik Turki, sekularisme, Atatürk, Islam, modernisasi, identitas keagamaan

Abstract

This study aims to examine the historical and ideological transformation of Turkey, from the Ottoman Empire as a symbol of Islamic glory to the Republic of Turkey founded on secular principles. The study covers the origins and development of the Ottoman Empire, the internal and external factors leading to its collapse, the ideas and reforms of Mustafa Kemal Atatürk, the forms of secularization implemented in state life, the resilience of Islamic values amid the tide of secularism, the impact of secularization on Turkish society, and the contemporary dynamics between secularism and the resurgence of Islamism. This research employs a descriptive qualitative method with historical and analytical approaches. The historical approach traces the journey of the Ottoman Empire until its fall and the establishment of the modern Turkish Republic, while the analytical approach is used to assess secularization policies and their impacts on society. The findings reveal that Turkey has undergone major transformations in its political, social, and cultural systems. Although secularism has been thoroughly applied, Islamic identity has persisted and continues to flourish within society. The process of secularization has succeeded in driving rapid modernization, yet it has also generated tensions between the state and religious groups. In the contemporary context, Turkey serves as a battleground between Atatürk's legacy of secularism and the growing aspirations of Islamism expressed through democratic means.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi historis dan ideologis Turki, dari Kekaisaran Utsmani sebagai simbol kejayaan Islam menuju Republik Turki yang menganut prinsip sekularisme. Kajian ini mencakup asal-usul dan perkembangan Kekaisaran Utsmani, faktor-faktor internal dan eksternal penyebab keruntuhannya, gagasan serta reformasi Mustafa Kemal Atatürk, bentuk-bentuk sekularisasi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, ketahanan nilai-nilai Islam di tengah arus sekularisme, dampak sekularisasi terhadap masyarakat, serta dinamika kontemporer antara sekularisme dan kebangkitan keislaman. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis dan analitis. Pendekatan historis menelusuri perjalanan Kekaisaran Utsmani hingga keruntuhannya dan berdirinya Republik Turki, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan sekularisasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Turki mengalami perubahan besar dalam sistem politik, sosial, dan budaya. Meskipun sekularisme diterapkan secara menyeluruh, identitas keislaman tetap bertahan dan berkembang dalam masyarakat. Proses sekularisasi berhasil mendorong modernisasi, namun juga memunculkan ketegangan antara negara dan kelompok keagamaan. Dalam konteks kontemporer, Turki menjadi medan tarik-menarik antara ideologi sekularisme warisan Atatürk dan aspirasi Islamisme yang berkembang melalui mekanisme demokratis.

How to cite: Andi Wawan Mulyawan, Abd. Rahim Yunus, Susmihara. "Kekaisaran Utsmani hingga Era Erdoğan: Jejak Perubahan Identitas Islam dalam Sejarah Turki", *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 3 (2025): 330-346. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2025, Andi Wawan Mulyawan, Abd. Rahim Yunus, Susmihara



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam mencatat banyak kerajaan besar yang memiliki peran signifikan dalam penyebaran agama, peradaban, ilmu pengetahuan, dan kekuatan politik. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Kekaisaran Utsmani (Ottoman Empire) menempati posisi yang sangat monumental. Berdiri pada akhir abad ke-13 oleh suku Turki Oghuz di bawah kepemimpinan Osman I, Kekaisaran Utsmani tumbuh dari sebuah wilayah kecil di Anatolia menjadi kekuatan dunia yang menguasai wilayah-wilayah luas di Asia, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara¹. Puncak kejayaan Utsmani terjadi pada abad ke-16 hingga 17, terutama di bawah pemerintahan Sultan Suleiman al-Qanuni (Suleiman the Magnificent), yang tidak hanya dikenal sebagai penakluk dan pemimpin militer ulung, tetapi juga sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni².

¹ Muhammad Basri et al., "Masa Kerajaan Turki Utsmani Serta Faktor Kemajuan Dan Kemunduran," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 3 (2023): 512-20.

² Dwi Ratnasari, "Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 14, no. 1 (2013): 70-87.

Kekaisaran ini bukan hanya memainkan peran sebagai kekuatan politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam dan pemersatu umat. Sejak runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258, dunia Islam mengalami disintegrasi politik, hingga akhirnya Kekhalifahan Islam secara simbolis dipulihkan melalui Sultan Selim I pada abad ke-16, yang mengklaim gelar khalifah setelah menaklukkan wilayah-wilayah Mamluk di Hijaz³. Dengan demikian, Sultan Utsmani tidak hanya menjadi penguasa politik, tetapi juga pemimpin spiritual umat Islam, sebuah posisi yang memberi legitimasi religius terhadap kekuasaannya. Di bawah naungan Utsmani, hukum Islam (syariat) menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan, dan para ulama memainkan peran dalam struktur negara.

Namun, seperti banyak kekaisaran besar lainnya dalam sejarah, Kekaisaran Utsmani tidak kebal terhadap dinamika perubahan zaman. Memasuki abad ke-18 dan 19, Utsmani mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang ditandai oleh melemahnya administrasi pusat, korupsi birokrasi, kekalahan dalam berbagai perang melawan Rusia, Austria, dan kekuatan Barat lainnya, serta tekanan dari kekuatan kolonial yang semakin ekspansif⁴. Upaya reformasi internal seperti *Tanzimat* dan *Ishlahat Fermanı* yang dimaksudkan untuk menyelamatkan kekaisaran malah sering menimbulkan ketegangan antara modernis dan tradisional. Di sisi lain, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan bangsa-bangsa non-Turki di wilayah Utsmani, mempercepat disintegrasi internal kekaisaran.

Keterlibatan Utsmani dalam Perang Dunia I (1914–1918) menjadi titik kritis dalam sejarahnya. Kekaisaran bergabung dengan Blok Sentral (Jerman dan Austria-Hongaria) dan mengalami kekalahan besar. Setelah perang, kekuasaan Utsmani praktis runtuh, dan wilayah-wilayahnya dibagi-bagikan kepada Inggris dan Prancis melalui perjanjian-perjanjian rahasia seperti *Sykes-Picot Agreement*. Perjanjian Sèvres (1920) secara resmi mengukuhkan pembubaran kekaisaran, namun juga memicu perlawanan sengit dari kalangan nasionalis Turki⁵.

Dalam situasi inilah muncul Mustafa Kemal Atatürk, seorang perwira militer karismatik yang menggalang gerakan nasionalis melalui Perang Kemerdekaan Turki. Setelah berhasil mengusir kekuatan asing dan menggagalkan implementasi penuh Perjanjian Sèvres, Atatürk mendirikan Republik Turki pada 29 Oktober 1923, dengan Ankara sebagai ibu kota baru. Ia secara sistematis menghapus sistem kekhalifahan pada tahun 1924, menandai akhir dari institusi yang telah mengikat dunia Islam secara simbolik selama berabad-abad⁶. Langkah ini bukan hanya

³ Mulia Safira, "Kepemimpinan Putra Mahkota Terhadap Runtuhnya Dinasti Abbasiyah," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 1–7.

⁴ Purwanto Revardo et al., "Kemunduran Peradaban Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 4, no. 2 (2024): 162–69.

⁵ Paula Kitching, "The Sykes-Picot Agreement and Lines in the Sand," *Historian*, no. 128 (2015): 18.

⁶ Astaman Astaman, Teguh Murdianto, and Syamzan Syukur, "Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal," *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 2 (2025): 46–53.

perubahan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan revolusi ideologis yang menandai pergeseran dari kekhalifahan Islam menuju negara nasional sekuler.

Reformasi Atatürk sangat radikal dan menyeluruh. Ia menggantikan hukum syariat dengan hukum sipil berdasarkan model Eropa (terutama Swiss), menghapus pengadilan agama, mengganti kalender Hijriyah dengan kalender Gregorian, mengganti aksara Arab dengan huruf Latin, dan menutup madrasah tradisional serta tarekat sufi. Ia juga memperkenalkan sistem pendidikan sekuler, memberlakukan larangan pakaian keagamaan di luar tempat ibadah, dan menghapus kementerian urusan agama. Semua langkah ini dilakukan dalam rangka membentuk negara-bangsa modern yang terpisah dari dominasi agama, dan selaras dengan prinsip-prinsip sekularisme, rasionalisme, dan nasionalisme Turki⁷.

Meskipun demikian, Islam tetap hidup dalam masyarakat Turki. Rakyatnya masih menjalankan ibadah, menjaga tradisi keislaman dalam keluarga dan budaya. Namun, ekspresi keislaman dalam ruang publik sangat dibatasi selama dekade-dekade awal republik. Baru pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, terutama dengan naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan, terjadi gelombang rekontekstualisasi Islam dalam ranah publik dan politik. Erdoğan dan partainya memanfaatkan demokrasi untuk mengakomodasi kembali aspirasi keislaman rakyat, termasuk dalam kebijakan pendidikan, media, dan kehidupan sosial⁸.

Kondisi inilah yang menjadikan Turki sebagai laboratorium sosial dan politik yang unik dalam dunia Islam. Negara ini terus menjadi medan tarik-menarik antara ideologi sekularisme ala Atatürk dan kebangkitan Islamisme demokratis. Dengan sejarah panjangnya, Turki tidak hanya mencerminkan dinamika internal suatu bangsa, tetapi juga memberikan cerminan bagaimana dunia Islam modern menghadapi tantangan modernitas, globalisasi, dan identitas keagamaan. Oleh karena itu, mempelajari dan mengkaji sejarah dan dinamika Turki sekuler menjadi penting sebagai jendela untuk memahami berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dunia Islam dalam konteks kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kekaisaran Utsmani dan proses transisinya menuju Republik Turki?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Utsmani?
3. Bagaimana proses pembentukan negara Turki sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk?
4. Apa saja bentuk reformasi sekuler yang diterapkan dalam Republik Turki modern?
5. Bagaimana dinamika integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip modern dalam konteks negara Turki?

⁷ Ibid.

⁸ Nahl Amalia Karmin, "Kemenangan AKP Pada Pemilu Di Turki 2007" (Universitas Al Azhar Indonesia, 2010).

6. Apa implikasi dari sekularisasi Turki terhadap identitas dan kehidupan keagamaan masyarakat Turki?
7. Bagaimana perkembangan terbaru Turki dalam konteks kebangkitan kembali nilai-nilai Islam dalam politik dan masyarakat?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Menjelaskan secara historis asal-usul dan perjalanan Kekaisaran Utsmani hingga transisinya menjadi Republik Turki.
 2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Utsmani.
 3. Mengungkap gagasan ideologis dan kebijakan reformasi Mustafa Kemal Atatürk dalam membentuk negara Turki sekuler.
 4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk sekularisasi yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara di Turki modern.
 5. Mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam tetap bertahan di tengah arus sekularisme di Turki.
 6. Menilai dampak sekularisasi terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Turki.
 7. Memberikan gambaran mengenai perkembangan kontemporer di Turki yang menunjukkan adanya dinamika antara sekularisme dan kebangkitan keislaman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek kajian yang diteliti⁹. Dalam konteks ini, penulis berusaha memaparkan fakta-fakta sejarah dan dinamika ideologis yang terjadi dalam proses transformasi Kekaisaran Utsmani menjadi Republik Turki yang sekuler.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah historis dan analitis¹⁰. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri jejak perkembangan Kekaisaran Utsmani sejak berdiri hingga runtuh, serta proses pembentukan negara Turki modern. Sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab runtuhnya kekhalifahan, serta menganalisis kebijakan-kebijakan sekularisasi dan dampaknya terhadap masyarakat Turki, khususnya dalam integrasi antara Islam dan modernitas.

2. PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Berdirinya Turki Sekuler

2.1.1. Runtuhnya Kekaisaran Utsmani (Ottoman Empire)

Kekaisaran Utsmani (Ottoman Empire) merupakan salah satu kekuatan besar dalam sejarah dunia Islam. Selama lebih dari enam abad (1299–1924), kekaisaran ini menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Namun, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20,

⁹ Nur Hikmatul Auliya et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Makassar: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

¹⁰ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/927/498>.

kekaisaran mulai mengalami kemunduran secara signifikan, yang pada akhirnya berujung pada keruntuhan total¹¹.

a. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Keruntuhan

Kemunduran Kekaisaran Utsmani disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, pemerintahan yang otoriter, korupsi birokrasi, serta lemahnya kepemimpinan menjadi penyebab utama kemerosotan kekuatan kekaisaran. Sistem suksesi yang tidak stabil, di mana pewaris takhta seringkali tidak dipersiapkan secara matang, turut memperburuk kondisi pemerintahan.

Selain itu, stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan, militer, dan teknologi membuat Utsmani tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Barat yang sedang mengalami revolusi industri dan pencerahan. Banyak reformasi yang dilakukan oleh penguasa Utsmani di akhir abad ke-19 seperti Tanzimat dan Usmani Muda, namun sebagian besar tidak mampu menjawab tantangan zaman secara komprehensif.

Faktor eksternal pun turut mempercepat kehancuran. Kekalahan dalam berbagai perang, seperti Perang Rusia-Turki dan Perang Balkan, menyebabkan kehilangan banyak wilayah strategis. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan Barat seperti Inggris, Perancis, dan Rusia secara aktif melemahkan Utsmani, baik melalui invasi militer maupun infiltrasi ideologi seperti nasionalisme di kalangan etnis-etnis non-Turki¹².

b. Keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I

Puncak kehancuran Kekaisaran Utsmani terjadi ketika terlibat dalam Perang Dunia I (1914–1918) sebagai bagian dari Blok Sentral (bersama Jerman dan Austria-Hongaria) yang akhirnya kalah perang. Dalam perang ini, banyak wilayah Utsmani yang menjadi medan tempur dan mengalami kerusakan parah. Kekalahan tersebut membuat kekaisaran dipaksa menerima Perjanjian Sèvres tahun 1920, yang secara drastis memecah dan membagi wilayah kekuasaan Utsmani kepada negara-negara pemenang perang¹³.

Situasi ini menciptakan kekacauan nasional, konflik internal, dan krisis identitas yang sangat parah. Wilayah Anatolia yang tersisa pun terancam oleh pendudukan Sekutu. Dalam kondisi inilah muncul perlawanan yang dipimpin oleh seorang tokoh militer revolusioner: Mustafa Kemal Atatürk.

2.1.2. Peran Mustafa Kemal Atatürk

a. Biografi Singkat dan Latar Belakang Militer

Mustafa Kemal Atatürk lahir pada tahun 1881 di kota Salonika (sekarang Thessaloniki, Yunani). Ia menempuh pendidikan militer dan memperlihatkan bakat kepemimpinan serta strategi yang luar biasa sejak muda. Karier militernya

¹¹ Basri et al., "Masa Kerajaan Turki Utsmani Serta Faktor Kemajuan Dan Kemunduran."

¹² Ibid.

¹³ Ratnasari, "Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani."

bersinar saat Perang Dunia I, terutama dalam Pertempuran Gallipoli, di mana ia berhasil memimpin pasukan Utsmani mempertahankan wilayah dari serangan Sekutu. Keberhasilan ini membuatnya populer dan disegani baik di kalangan militer maupun rakyat.

Setelah kekalahan Utsmani dalam Perang Dunia I, Mustafa Kemal menolak tunduk pada perjanjian-perjanjian yang merugikan. Ia memimpin perang kemerdekaan Turki (1919–1922) melawan kekuatan asing dan pemerintahan Sultan yang dianggap lemah. Melalui perjuangan ini, ia berhasil mempersatukan rakyat Turki dan memaksa negara-negara Barat untuk mengakui kemerdekaan bangsa Turki melalui Perjanjian Lausanne (1923)¹⁴.

b. Perannya dalam Pembentukan Republik Turki pada Tahun 1923

Setelah berhasil mengusir penjajah dan menggulingkan kekuasaan Sultan, Mustafa Kemal mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Ia diangkat sebagai presiden pertama dan langsung memulai serangkaian reformasi radikal untuk membangun negara Turki yang modern, nasionalis, dan sekuler.

Langkah pertamanya adalah menghapus sistem kekaisaran, mengganti sistem pemerintahan menjadi republik dengan konstitusi modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Hal ini menjadi titik balik sejarah, tidak hanya bagi Turki, tetapi juga bagi dunia Islam, karena untuk pertama kalinya sejak era Khulafā' al-Rāsyidīn, dunia Islam tidak lagi memiliki simbol kekhalfahan yang bersifat universal¹⁵.

c. Penghapusan Sistem Kekhalifahan dan Institusi-Institusi Keagamaan

Pada tahun 1924, Mustafa Kemal secara resmi menghapus institusi kekhalfahan yang telah menjadi simbol persatuan umat Islam selama berabad-abad. Tidak hanya itu, berbagai institusi keagamaan seperti Kementerian Agama, pengadilan syariah, dan madrasah tradisional juga dibubarkan atau disubordinasikan di bawah negara.

Reformasi ini mencakup:

- Penggantian hukum Islam (syariah) dengan hukum sipil Eropa.
- Penghapusan pengaruh ulama dari sistem pemerintahan dan pendidikan.
- Pelarangan pemakaian fez (topi khas Utsmani) dan penggantian aksara Arab dengan huruf Latin.
- Penutupan tarekat-tarekat sufi dan pelarangan aktivitas religius di luar kontrol negara.

Tujuan utama Atatürk adalah menciptakan identitas bangsa Turki yang modern, sekuler, dan terlepas dari simbol-simbol kekuasaan Islam masa lalu. Ia

¹⁴ Astaman, Murdianto, and Syukur, "Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal."

¹⁵ Ahmad Dhiyaul Haq Mahsyar, Alfiansyah Anwar, and Umar Sulaiman, "Islam Sekuler Di Turki Dan Pemikiran Kemal Atatürk," *CARITA*, 2023, 18–32.

ingin Turki lebih dekat secara budaya dan politik dengan Eropa Barat ketimbang dunia Islam¹⁶.

2.2. Perkembangan Turki dalam Era Sekuler

Setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, negara ini mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Visi utama Atatürk adalah menjadikan Turki sebagai negara modern yang setara dengan negara-negara Barat. Untuk mencapai hal tersebut, ia menerapkan kebijakan sekularisasi secara menyeluruh, mencakup bidang hukum, pendidikan, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat. Era ini menjadi fondasi awal dari identitas baru Turki yang sekuler dan nasionalis, jauh berbeda dari karakter keislaman Kekaisaran Utsmani¹⁷.

2.2.1. Kebijakan Sekularisasi oleh Atatürk

a. Reformasi Hukum, Pendidikan, dan Bahasa

Salah satu langkah paling signifikan dalam sekularisasi Turki adalah reformasi besar-besaran di bidang hukum. Hukum Islam yang sebelumnya menjadi dasar hukum negara digantikan dengan hukum sipil berdasarkan model Eropa, khususnya hukum Swiss untuk hukum perdata dan hukum Italia untuk hukum pidana. Pengadilan syariah dihapus dan diganti dengan sistem peradilan nasional yang sepenuhnya terpisah dari institusi keagamaan¹⁸.

Dalam bidang pendidikan, Atatürk menutup madrasah tradisional dan menggantinya dengan sistem pendidikan nasional sekuler. Kurikulum agama dihilangkan dari sekolah-sekolah negeri, dan sistem pendidikan disusun agar berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tujuannya adalah membentuk generasi baru yang rasional, nasionalis, dan bebas dari dominasi dogma agama.

Bahasa Turki juga mengalami reformasi radikal. Aksara Arab diganti dengan aksara Latin pada tahun 1928, dan dilakukan pemurnian bahasa dari istilah-istilah yang dianggap terlalu banyak mengandung pengaruh Arab dan Persia. Langkah ini bukan hanya perubahan linguistik, tetapi juga simbol pemisahan identitas bangsa Turki dari akar Islaminya menuju identitas baru yang lebih sekuler dan Eropa-sentris.

b. Penghapusan Syariat Islam dari Sistem Hukum Negara

Atatürk menghapus syariat Islam dari sistem hukum Turki secara total. Undang-undang yang sebelumnya bersumber dari fikih Islam digantikan dengan hukum Barat yang bersifat sekuler. Pernikahan, perceraian, warisan, dan persoalan keluarga lainnya kini diatur oleh hukum sipil. Tidak ada lagi pengakuan resmi terhadap fatwa atau keputusan ulama dalam ranah hukum negara.

¹⁶ Desi Yuniarti, Syamzan Syukur, and Susmihara Susmihara, "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 11–21.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mahsyar, Anwar, and Sulaiman, "Islam Sekuler Di Turki Dan Pemikiran Kemal Ataturk."

Akibatnya, agama diposisikan sebagai urusan pribadi, bukan lagi fondasi negara. Masjid dan institusi keagamaan diawasi secara ketat oleh negara melalui lembaga bernama Diyanet İşleri Başkanlığı (Direktorat Urusan Agama), yang ironisnya dibentuk oleh negara sekuler untuk mengontrol praktik agama agar tidak bertentangan dengan kebijakan sekularisme.

c. Nasionalisme Turki sebagai Pengganti Identitas Keagamaan

Untuk menggantikan identitas keagamaan sebagai dasar persatuan rakyat, Atatürk membangun ideologi nasionalisme Turki. Ia menekankan pentingnya kebanggaan terhadap budaya, sejarah, dan bahasa Turki sebagai unsur pemersatu bangsa. Agama tidak lagi menjadi dasar identitas kolektif, melainkan digantikan oleh etnisitas dan loyalitas terhadap negara bangsa (nation-state).

Dalam doktrin Kemalisme, yaitu ideologi resmi negara pada masa Atatürk, sekularisme (laiklik) dan nasionalisme (milliyetçilik) menjadi pilar utama. Identitas “Muslim” yang sebelumnya melekat pada warga Utsmani, digantikan dengan identitas “Turki” yang sekuler, rasional, dan modern. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur negara, tetapi juga pada persepsi rakyat terhadap diri mereka sendiri dan masa lalu mereka¹⁹.

2.2.2. Transformasi Sosial dan Budaya

a. Perubahan Peran Perempuan dalam Masyarakat

Atatürk memandang bahwa modernisasi Turki tidak dapat tercapai tanpa emansipasi perempuan. Oleh karena itu, ia mendorong peran aktif perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Perempuan diberikan hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, berpartisipasi dalam kehidupan publik, bahkan mendapatkan hak pilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu sejak tahun 1930-an, jauh lebih awal dibandingkan banyak negara Eropa lainnya.

Pakaian tradisional perempuan seperti hijab dan cadar tidak secara eksplisit dilarang, namun secara sistematis ditekan melalui kebijakan dan kampanye budaya. Negara mempromosikan citra perempuan modern Turki yang berpendidikan, bekerja di ruang publik, dan berpakaian sesuai standar Barat. Ini menjadi bagian dari proyek besar menciptakan masyarakat yang sekuler dan bebas dari simbol-simbol keagamaan²⁰.

b. Westernisasi dalam Gaya Hidup dan Struktur Masyarakat

Reformasi budaya juga dilakukan melalui proses **Westernisasi** dalam berbagai aspek kehidupan. Negara mulai memperkenalkan sistem kalender Gregorian menggantikan kalender Hijriah, mengganti hari libur dari Jumat menjadi Minggu, serta memperkenalkan pakaian Barat bagi pegawai negeri dan tokoh masyarakat.

¹⁹ Ela Hikmah Hayati, “Kebijakan Politik Mustafa Kemal Atatürk Terhadap Suku Kurdi Di Turki 1923-1938 M,” *Buletin Al-Turas* 23, no. 2 (2017): 231–50.

²⁰ Mahsyar, Anwar, and Sulaiman, “Islam Sekuler Di Turki Dan Pemikiran Kemal Atatürk.”

Simbol-simbol budaya Islam dan Timur secara perlahan digantikan oleh simbol Barat, termasuk dalam arsitektur, musik, seni, dan tata kota. Gaya hidup masyarakat di kota-kota besar seperti Ankara dan Istanbul berubah drastis, mencerminkan nilai-nilai sekuler dan modern ala Eropa.

Struktur sosial masyarakat pun mengalami pergeseran. Kelompok agama seperti ulama, santri, dan sufi kehilangan posisi sentral dalam masyarakat. Sebaliknya, kelas menengah baru yang terdidik secara sekuler dan pro-Barat menjadi elit baru yang memegang kendali politik dan ekonomi²¹.

2.3. Respon dan Dinamika Masyarakat terhadap Sekularisme di Turki

Penerapan sekularisme yang radikal oleh Mustafa Kemal Atatürk pada awal abad ke-20 telah menciptakan gelombang perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan keagamaan di Turki. Meskipun reformasi ini dimaksudkan sebagai langkah modernisasi dan pembaruan nasional, dampaknya tidak bersifat seragam bagi seluruh elemen masyarakat. Sebaliknya, ia justru memunculkan beragam reaksi, mulai dari dukungan antusias hingga penolakan keras. Ketegangan yang ditimbulkan oleh reformasi sekular tersebut tidak hanya menjadi konflik sementara, tetapi berkembang menjadi dinamika panjang yang membentuk wajah politik dan identitas nasional Turki hingga saat ini.

2.3.1. Dukungan dari Kelompok Sekuler dan Modernis

Penerapan prinsip sekularisme di Turki mendapatkan sambutan hangat dari kalangan elit modernis, birokrat, dan militer. Bagi kelompok ini, sekularisme bukan sekadar pemisahan agama dari negara, melainkan fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat, maju, dan terlepas dari cengkeraman masa lalu. Para birokrat dan militer, yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan negara, memandang sekularisme sebagai jaminan stabilitas nasional. Dengan menyingkirkan pengaruh agama dari urusan kenegaraan, mereka percaya bahwa Turki akan mampu meniru keberhasilan negara-negara Barat.

Kelompok masyarakat urban dan terpelajar juga menjadi garda depan dalam mendukung ideologi sekular. Mereka cenderung mengadopsi gaya hidup Barat, berpandangan terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, serta menyambut perubahan yang dilakukan Atatürk sebagai bentuk emansipasi dari keterbelakangan. Dalam konteks ini, perempuan-perempuan modern yang memperoleh hak-hak sipil baru, seperti hak memilih, bekerja, dan berpendidikan, menjadi simbol dari keberhasilan proyek sekularisasi.

Bagi kelompok ini, sekularisme bukan hanya strategi politik, tetapi juga ideologi pembebasan. Ia membebaskan Turki dari sistem teokratis Kekaisaran Utsmani yang dianggap mengekang dan konservatif. Oleh karena itu, dukungan

²¹ Ibid.

mereka terhadap sekularisme sering disertai dengan semangat nasionalisme baru yang identik dengan Turki modern dan sekuler²².

2.3.2. Penolakan dan Perlawanan dari Kelompok Islamis

Namun, tidak semua lapisan masyarakat menerima reformasi sekular ini dengan tangan terbuka. Bagi kelompok Islamis, ulama tradisional, dan masyarakat pedesaan, kebijakan sekularisasi yang diterapkan dengan cara yang represif dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap jati diri Islam yang telah melekat erat dalam kehidupan bangsa. Mereka memandang reformasi Atatürk sebagai pemaksaan nilai-nilai asing yang bertentangan dengan tradisi lokal.

Kaum ulama dan santri menjadi kelompok yang paling terdampak, sebab peran mereka dalam pendidikan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dipangkas drastis. Pesantren-pesantren (madrasah), masjid, dan tarekat kehilangan fungsi sosial-politiknya, dan aktivitas keagamaan dibatasi secara ketat. Hal ini membuat banyak ulama merasa terasing di negeri sendiri.

Masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh ajaran Islam sebagai panduan hidup juga mengalami guncangan budaya. Mereka tidak serta-merta memahami perubahan simbol-simbol kenegaraan dan budaya, seperti penghapusan huruf Arab, pelarangan adzan dalam bahasa Arab, dan larangan berpakaian Islami. Reaksi penolakan pun muncul dalam berbagai bentuk, baik secara pasif dengan mempertahankan praktik keislaman secara tersembunyi, maupun secara aktif dengan membentuk gerakan perlawanan.

Dari rahim penolakan ini, kemudian lahirlah partai-partai politik berbasis Islam yang mengusung agenda re-Islamisasi Turki, seperti Partai Refah di bawah pimpinan Necmettin Erbakan dan kelak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di bawah Recep Tayyip Erdoğan. Partai-partai ini menjadi wadah artikulasi politik dari aspirasi kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem sekular negara²³.

2.3.3. Represi dan Pembatasan Terhadap Simbol Keislaman

Untuk menjaga kemurnian prinsip sekularisme, pemerintah Turki sejak masa Atatürk hingga beberapa dekade berikutnya menerapkan berbagai kebijakan pembatasan terhadap simbol-simbol keislaman. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah pelarangan penggunaan jilbab di institusi pemerintahan dan kampus negeri. Larangan ini memaksa banyak perempuan muslimah untuk memilih antara pendidikan dan iman, sebuah dilema yang mencerminkan ketegangan ideologis antara negara dan warga negaranya sendiri.

Tidak hanya itu, aktivitas dakwah dan ceramah agama yang tidak diatur oleh negara juga dilarang. Negara mengontrol penuh keberagaman melalui institusi resmi bernama Diyanet (Direktorat Urusan Agama), yang secara struktural

²² Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 51-70.

²³ Karmin, "Kemenangan AKP Pada Pemilu Di Turki 2007."

bertanggung jawab kepada pemerintah dan berfungsi sebagai corong sekularisme dalam bidang agama. Pesantren dan tarekat berada dalam pengawasan ketat, dan penyimpangan dari ajaran "resmi" negara dapat berujung pada penutupan atau pembubaran.

Kebijakan ini banyak dikritik oleh kalangan pegiat hak asasi manusia dan aktivis kebebasan beragama. Mereka menilai bahwa sekularisme yang diterapkan bukan dalam arti netralitas agama, melainkan sebagai instrumen penindasan terhadap identitas keislaman. Akibatnya, terjadi alienasi antara negara dan sebagian masyarakat yang menganggap negara tidak lagi merepresentasikan nilai-nilai Islam²⁴.

2.3.4. Dinamika Politik dan Kebangkitan Islamisme

Seiring berjalannya waktu, kebijakan sekular yang ketat justru memicu kebangkitan gerakan Islamisme yang lebih terorganisir. Gelombang ini mulai terasa pada akhir abad ke-20, ditandai dengan kemenangan partai-partai Islam dalam berbagai pemilu lokal maupun nasional. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan ini adalah Necmettin Erbakan yang berhasil menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1996. Kepemimpinannya menandai titik penting bahwa Islam kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Turki.

Selain itu, muncul pula gerakan-gerakan dakwah Islam seperti yang dipimpin oleh Fethullah Gülen, yang memanfaatkan jalur pendidikan dan media untuk membangun kesadaran Islam modern. Gerakan ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, toleransi, dan dialog antaragama, namun tetap menjaga identitas keislaman. Keberhasilannya menyebar hingga ke luar negeri menjadikan gerakan Gülen sebagai fenomena global.

Namun, puncak dari dinamika ini terjadi pada era kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan Partai AKP yang berhasil memenangkan pemilu tahun 2002. AKP tidak hanya membawa semangat reformasi ekonomi dan demokrasi, tetapi juga memperjuangkan pelonggaran sekularisme negara. Kebijakan seperti pencabutan larangan jilbab di institusi publik, penguatan Diyanet, serta pengembangan sekolah-sekolah agama menunjukkan arah baru bagi Turki: dari sekularisme ketat menuju negara dengan ruang lebih besar bagi ekspresi keislaman²⁵.

2.3.5. Ketegangan antara Sekularisme dan Islamisme di Era Modern

Meskipun pemerintahan AKP berhasil mengakomodasi aspirasi kelompok religius, ketegangan antara sekularisme dan Islamisme tidak serta-merta mereda. Justru dalam era modern ini, konflik antara dua kutub tersebut mengalami transformasi menjadi bentuk-bentuk baru. Ketegangan politik antara elit militer yang berperan sebagai penjaga ideologi sekular dengan pemerintahan sipil yang

²⁴ Fauzan and Fata, "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)."

²⁵ Karmin, "Kemenangan AKP Pada Pemilu Di Turki 2007."

religius menciptakan drama politik yang tidak jarang memicu intervensi militer, seperti yang terjadi dalam berbagai upaya kudeta²⁶.

Selain itu, terjadi pula polarisasi sosial yang semakin tajam. Masyarakat Turki terbelah menjadi dua kutub besar: kelompok sekuler pro-Barat yang mendukung nilai-nilai modernitas liberal, dan kelompok konservatif pro-Islam yang menginginkan kembalinya nilai-nilai religius dalam sistem kenegaraan. Polarisasi ini bahkan merambah ke dunia pendidikan, media, dan kehidupan sosial sehari-hari.

Pemerintahan AKP pun mendapat kritik karena dianggap memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk memperkuat kekuasaan dan membungkam oposisi. Kebebasan pers, independensi lembaga hukum, dan hak-hak oposisi menjadi isu penting dalam diskursus demokrasi di Turki. Pertanyaannya pun mengemuka: apakah kebangkitan Islam dalam politik Turki membawa nilai-nilai demokratis, atau justru menciptakan bentuk otoritarianisme baru dengan baju religius?

2.3.6. Kesadaran Baru dan Arah Masa Depan

Kini, Turki berada dalam persimpangan jalan antara dua arah besar sejarahnya: mempertahankan warisan sekularisme ala Atatürk, atau membuka ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan publik. Dinamika ini tercermin dalam sikap generasi muda Turki yang semakin beragam dalam menyikapi isu sekularisme dan religiusitas.

Sebagian generasi muda menerima kemajuan modernitas—dalam hal teknologi, pendidikan, dan hak asasi—namun tetap memegang nilai-nilai keagamaan secara personal. Mereka menginginkan negara yang adil dan inklusif, tanpa harus bersikap antagonis terhadap agama. Sebaliknya, sebagian lainnya merasa penting untuk menjaga sekularisme agar tidak terjadi dominasi agama dalam politik, dan menolak segala bentuk politisasi agama.

Di sisi lain, kelompok yang lebih religius juga tumbuh, mengadopsi ide-ide Islamis secara aktif dan ingin menjadikan Islam sebagai dasar moral publik dan kebijakan negara. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini menjadikan identitas Turki semakin kompleks, dan masa depan negara ini bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemerintah mampu menemukan titik keseimbangan antara agama dan negara, antara tradisi dan modernitas²⁷.

2.4. Turki dalam Konteks Global

2.4.1. Hubungan dengan Dunia Barat

Sejak didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Turki telah berupaya membangun hubungan erat dengan dunia Barat, terutama setelah penerapan kebijakan sekularisme yang bertujuan untuk memodernisasi negara. Salah satu

²⁶ Adib Khairil Musthafa and Hanik Purwati, "Sejarah Dan Tranformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme Dan Islamisme," *Jurnal Tamaddun* 10, no. 1 (2022).

²⁷ Adib Khairil Musthafa and Hanik Purwati, "Sejarah Dan Tranformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme Dan Islamisme," *Jurnal Tamaddun* 10, no. 1 (2022).

tujuan utama dalam hubungan ini adalah aspirasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE). Proses ini dimulai sejak 1963, ketika Turki menandatangani perjanjian dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC), yang menjadi cikal bakal hubungan yang lebih formal antara Turki dan negara-negara Eropa.

Namun, perjalanan Turki menuju keanggotaan UE tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, baik dari dalam negeri Turki maupun dari negara-negara anggota UE itu sendiri. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan reformasi politik yang masih dianggap kurang di Turki, meskipun negara ini telah melakukan berbagai perubahan sejak awal 2000-an. Selain itu, sikap UE terhadap konflik antara Turki dan Yunani, serta masalah hak-hak minoritas seperti Kurdi, juga memengaruhi proses negosiasi.

Meski demikian, Turki tetap menjadikan keanggotaan dalam UE sebagai tujuan strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik, serta meningkatkan daya saing internasional. Pada saat yang sama, Turki juga berusaha menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara besar Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, yang menjadi mitra dagang utama.

Di sisi lain, hubungan Turki dengan dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, juga sangat penting. Kedua negara telah menjalin aliansi strategis, yang terlihat jelas dalam keikutsertaan Turki dalam berbagai organisasi internasional seperti NATO. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus, dengan adanya ketegangan terkait kebijakan luar negeri, terutama dalam masalah konflik di Timur Tengah dan pendirian pangkalan militer Amerika di Turki.

2.4.2. Posisi Strategis antara Eropa dan Dunia Islam

Turki memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, serta menjadi penghubung antara dunia Barat dan dunia Islam. Letak ini memberikan Turki pengaruh yang besar dalam politik internasional, khususnya dalam konteks hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dan Eropa.

Sebagai negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim namun dengan sistem sekuler, Turki memiliki keunikan yang memungkinkan untuk memainkan peran sebagai jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Hal ini menjadikan Turki memiliki kapasitas untuk mengatasi ketegangan yang sering muncul antara kedua dunia tersebut, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun budaya.

Turki juga menjadi negara yang mampu mempertahankan hubungan yang cukup kuat dengan negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, sementara tetap menjalin kerja sama yang produktif dengan negara-negara Barat. Dalam hal ini, Turki seringkali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik, serta turut berperan dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang melibatkan negara-negara besar.

2.4.3. Peran Diplomatik dan Geo-politik

Dalam beberapa dekade terakhir, Turki telah semakin aktif dalam peran diplomatik dan geo-politiknya di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Kebijakan luar negeri Turki di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan, mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif, dengan tujuan untuk memperkuat posisi negara di kancah global.

Turki telah terlibat dalam berbagai upaya mediasi dan resolusi konflik di wilayah Timur Tengah, termasuk dalam konflik di Suriah, Irak, dan Libya. Turki juga berperan dalam menyelesaikan ketegangan antara Palestina dan Israel, serta berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab. Dalam hal ini, Turki berusaha memanfaatkan posisi geografis dan pengaruh politiknya untuk menjadi kekuatan yang lebih besar di kawasan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri Turki adalah penggunaan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan geopolitik. Turki memiliki militer yang kuat, yang juga turut berperan dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut, termasuk dalam operasi militer di Suriah untuk melawan kelompok-kelompok teroris dan untuk mengamankan perbatasannya.

2.4.4. Pengaruh Turki dalam Organisasi Dunia Islam (OKI, dsb)

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mengadopsi sistem pemerintahan sekuler, Turki memainkan peran yang penting dalam organisasi dunia Islam, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sejak keanggotaan Turki dalam OKI pada 1969, negara ini telah aktif terlibat dalam berbagai isu yang berkaitan dengan dunia Islam, baik di tingkat regional maupun internasional.

Turki mengusung pendekatan moderat dalam politik Islam, berusaha menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi dalam sistem pemerintahan sekuler tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, Turki mencoba untuk memberikan contoh bagi negara-negara Muslim lainnya yang tengah berjuang untuk menemukan keseimbangan antara agama dan negara.

Di sisi lain, Turki juga berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim melalui kerja sama ekonomi, perdagangan, dan budaya. Salah satu contoh penting adalah upaya Turki untuk memimpin inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara Muslim, seperti dengan mengadakan forum-forum internasional, serta mendukung program-program pembangunan untuk negara-negara yang lebih miskin di dunia Islam.

Namun, Turki tidak selalu berada di garis depan dalam beberapa isu besar dunia Islam, seperti dalam konflik Palestina-Israel, di mana beberapa negara lebih menonjol dalam perjuangan tersebut. Meski demikian, Turki tetap menjadi salah satu negara yang dianggap sebagai kekuatan penting di dunia Islam, yang memiliki pengaruh dalam membentuk arah kebijakan internasional terkait dunia Islam.

Secara keseluruhan, peran Turki dalam konteks global sangat dipengaruhi oleh posisinya yang unik antara dunia Barat dan dunia Islam. Meskipun Turki menghadapi berbagai tantangan dalam hal hubungan internasional, kebijakan luar

negeri yang aktif dan diplomasi yang cermat memungkinkan negara ini untuk tetap menjadi pemain kunci dalam geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah dan Eropa.

3. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Umum

Turki telah menjalani transformasi yang luar biasa dalam sejarahnya, beralih dari sebuah kerajaan Islam yang luas dan berpengaruh, yaitu Kekaisaran Utsmani, menjadi sebuah negara sekuler modern yang diatur oleh prinsip-prinsip sekularisme yang diperkenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Proses ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur politik, sosial, dan budaya Turki. Meskipun sekularisme diimplementasikan secara radikal melalui penghapusan institusi keagamaan dan pembaruan hukum yang mengutamakan sekularitas, Turki tetap berhasil mempertahankan identitas agama Islam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam praktiknya, meskipun negara sekuler, nilai-nilai Islam masih mengakar kuat di masyarakat, yang terlihat dalam perilaku sehari-hari, tradisi, dan interaksi sosial.

Sekularisme yang diterapkan di Turki berhasil membawa negara ini menuju modernisasi yang pesat, meskipun tidak tanpa tantangan. Proses sekularisasi ini tidak sepenuhnya menghapuskan kehidupan agama dalam masyarakat, namun menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas religius mereka dalam batasan yang ditentukan oleh negara. Meskipun sekularisme di Turki dipandang sebagai keberhasilan dalam memodernisasi negara, hal ini tetap menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara negara dan kelompok Islam, serta antara nilai-nilai Barat dan lokal yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat Turki.

3.2. Saran

Mengingat pengalaman Turki, penting bagi negara-negara Muslim untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi untuk modernitas dengan penghargaan terhadap nilai-nilai agama. Modernitas bukanlah sesuatu yang harus dipahami sebagai penghapusan total terhadap tradisi dan agama, tetapi lebih kepada bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Pembangunan yang sukses memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dengan penghormatan terhadap tradisi dan identitas religius. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memodernisasi negara, tetapi juga mengakomodasi keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat. Dialog yang konstruktif antara pihak sekuler dan religius menjadi kunci untuk menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis, di mana modernitas dan agama dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astaman, Astaman, Teguh Murdianto, and Syamzan Syukur. "Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal." *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 2 (2025): 46-53.
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Makassar: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Basri, Muhammad, Putri Puspita Hasri, Najwa Mahfudza, and Fadiza Syafira Nasution. "Masa Kerajaan Turki Utsmani Serta Faktor Kemajuan Dan Kemunduran." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 3 (2023): 512-20.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 51-70.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127-35.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/927/498>.
- Hayati, Ela Hikmah. "Kebijakan Politik Mustafa Kemal Ataturk Terhadap Suku Kurdi Di Turki 1923-1938 M." *Buletin Al-Turas* 23, no. 2 (2017): 231-50.
- Karmin, Nahl Amalia. "Kemenangan AKP Pada Pemilu Di Turki 2007." Universitas Al Azhar Indonesia, 2010.
- Kitching, Paula. "The Sykes-Picot Agreement and Lines in the Sand." *Historian*, no. 128 (2015): 18.
- Mahsyar, Ahmad Dhiyaul Haq, Alfiansyah Anwar, and Umar Sulaiman. "Islam Sekuler Di Turki Dan Pemikiran Kemal Ataturk." *CARITA*, 2023, 18-32.
- Musthafa, Adib Khairil, and Hanik Purwati. "Sejarah Dan Tranformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme Dan Islamisme." *Jurnal Tamaddun* 10, no. 1 (2022).
- Ratnasari, Dwi. "Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani." *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 14, no. 1 (2013): 70-87.
- Revarado, Purwanto, Sandra Hidayat, Riska Nadia, and M Khadafi. "Kemunduran Peradaban Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 4, no. 2 (2024): 162-69.
- Safira, Mulia. "Kepemimpinan Putra Mahkota Terhadap Runtuhnya Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 1-7.
- Yuniarti, Desi, Syamzan Syukur, and Susmihara Susmihara. "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal." *JURNAL ILMIAH FALSFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 11-21.